



PEKAN DEPAN UJI PUBLIK KMS Tak Bisa Usulkan Keluarga Miskin Baru

YOGYA (KR) - Proses verifikasi lapangan calon pemegang Kartu Menuju Sehat (KMS) 2015 berhasil diselesaikan. Sebelum diajukan ke Walikota, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Yogyakarta perlu melakukan uji publik yang melibatkan perangkat RT dan RW.

Direncanakan, uji publik akan digelar pekan depan. Dalam proses kali ini, usulan terhadap keluarga miskin baru sudah tidak bisa dilakukan.

"Uji publik besok itu tahap kedua. Tahap perta-

ma sudah digelar Februari lalu sehingga sudah tidak ada lagi usulan baru," papar Kepala Bidang Bantuan dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta Tri Maryatun, Minggu (9/11).

Oleh karena itu selama uji publik, petugas hanya akan mencoret data warga yang tidak sesuai dengan parameter. Total keluarga yang akan diuji publik 25.443 KK. Terdiri dari pemegang KMS tahun ini sebanyak 20.481 KK dan usulan dari masyarakat sebanyak 4.962 KK.

Tri Maryatun menambahkan, usulan paling banyak dari Kelurahan Prawirodirjan yakni 322 KK, disusul Kelurahan Pringgokusuman 228 KK. Kendati hasil dari verifikasi lapangan sudah mencerminkan jumlah keluarga yang berhak mendapatkan jaminan perlindungan sosial, namun Dinsosnakertrans belum berani menyimpulkan.

"Kami perlu mendapat umpan balik dari wilayah selaku pihak yang mengetahui secara riil kondisi warganya melalui uji publik itu," imbuhnya.

Sebelum melakukan uji publik, perangkat RT dan RW akan disodorkan data hasil verifikasi. Harapannya melalui data tersebut, tokoh masyarakat bisa melakukan pencermatan. Sehingga saat diundang ke Kelurahan untuk uji publik, masing-masing wilayah tinggal memberikan masukan terhadap data yang tidak tepat.

Terhadap data yang tidak tepat, petugas akan melakukan verifikasi cepat. Sesuai tahapan, akhir November proses uji publik tuntas dan Desember sudah bisa ditetapkan oleh Walikota.

Program KMS tersebut selain menjadi dasar pemberian jaminan perlindungan sosial juga sebagai parameter pembangunan. Terutama menyangkut perkembangan warga kategori rentan miskin, miskin dan fakir miskin. Pemegang KMS berhak memperoleh jaminan pendidikan, kesehatan dan berbagai santunan. (Dhi)-a

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 Mei 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005